



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 258 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi dan kelangsungan organisasi.
5. Kepala . . .

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2021-2026
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.
12. Program adalah sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah
13. Kegiatan adalah bagian dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan.
15. Keluaran adalah keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk.

16. Masukan . . .

16. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran

## BAB II

### MUATAN DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah memuat:

- a. Program dan Kegiatan
- b. Lokasi kegiatan
- c. Kelompok Sasaran; dan
- d. Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa dan Kecamatan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat yang rentan termaginalkan.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
  - a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. Indikator . . .

- b. Indikator Kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

### BAB III

#### PEUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

##### Pasal 4

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

##### Pasal 5

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai renja perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 6 . . .

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Perubahan Renja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Agustus.
- (2) Penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah berpedoman pada renstra perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 7

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan renstra perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

#### Pasal 9

Hasil Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat;

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan . . .

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempunakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok saasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG dalam Forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Rancangan Perubahan renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Preangkat Daerah.
- (3) Rancangan renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12 . . .



#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret

#### Pasal 13

- (1) BAPPEDALITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan renja perangkat daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah ke pada kepala BAPPEDALITBANG.

#### Pasal 14

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## Bagian Kelima

### Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 15

- (1) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Bagian Keenam

### Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 16

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disampaikan kepalaPerangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 17

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),harus dapat menjamin program, kegiatan dan paguindikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturanKepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG.

#### Pasal 18

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

#### Pasal 19

- (1) BAPPEDALITBANG menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

#### Pasal 20

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

/BAB IV  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Juli 2023  
BUPATI SERANG,  
ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 258;

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011